

**KINERJA KELEMBAGAAN PNPM-MPD DALAM MANAJEMEN
BANTUAN MODAL USAHA PETANI MISKIN DI KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PNPM-MPD Institutional Performance Management Assistance In Poor
Farmers Capital Business District Seko Luwu North District
South Sulawesi Province**

Ita Purnamasari Idris¹⁾

¹⁾ Mahasiwa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu
Email : Ita_Purnama74@yahoo.co.id

ABSTRACT

Rural PNPM Mandiri (PNPM-MPd) in principle is the welfare of the poor and rural employment opportunities independently through increased community participation (especially the poor, women's groups and community / marginalized groups). This study aims to measure institutional performance (PNPM-MPd) in the management of venture capital support poor farmers. The research was conducted in the Seko Luwu Northern District of South Sulawesi province. Take as many (26 respondents) by using simple techniques cluster sampling the importance of the 3 villages namely, medieval village, and village the farthest village from District Seko. In addition to determining the respondents also used purposive technique. Based on the results of research that PNPM-MPd institutional performance shows that the institutional performance PNPM-MPd is 88.46% which shows high institutional performance criteria.

Key words: Institutional performance PNPM-MPD, venture capital, poor farmers, Distric Seko

ABSTRAK

PNPM mandiri pedesaan (PNPM-MPd) pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/ kelompok yang terpinggirkan). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja kelembagaan (PNPM-MPd) dalam manajemen bantuan modal usaha petani miskin melalui persepsi dari petani miskin dan tim fasilitator keuangan PNPM-MPd yang ada di kecamatan ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Mengambil sebanyak (26 responden) dengan menggunakan tehnik *simple cluster sampling* maka didapat 3 desa yaitu desa terdekat, desa pertengahan, dan desa terjauh dari Kecamatan Seko. Selain itu untuk menentukan responden juga digunakan tehnik *purposive*. Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Kinerja kelembagaan PNPM-MPd menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan PNPM-MPd adalah 88,46 % yang menunjukkan kriteria kinerja lembaga tinggi.

Kata Kunci : Kinerja kelembagaan PNPM-MPD, Modal usaha, petani miskin, Kecamatan Seko

PENDAHULUAN

Tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah Presiden RI telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. Oleh karena itu mulai tahun 2007 mencanangkan program

PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal (Puspa, 2010).

Pelaksanaan PNPM Mandiri (PNPM-M) tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).

Program PNPM Mandiri (PNPM-M) terdapat dua mekanisme, yaitu : (1) mekanisme penyaluran dana adalah proses penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dari kas daerah ke rekening BLM yang dimana dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). (2) mekanisme pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif oleh BLM yang dikelola oleh UPK kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).

Lingkup kegiatan PNPM mandiri pedesaan (PNPM-MPd) pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM mandiri pedesaan (PNPM-MPd) dapat diklarifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin

atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi yang berbasis sumberdaya lokal, (4) penambahan permodalan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).

Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terlebih dahulu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam program kegiatan harus diketahui. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran - ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja sangat penting karena merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)

Pelaksanaan PNPM - MPd di Kecamatan Soko meliputi beberapa teknis operasional yaitu sosialisasi dan penyebaran informasi, fasilitas, dan pelatihan, musyawarah – musyawarah PNPM-MPd di Kecamatan Soko, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Teknis operasional ini telah dijalankan sejak PNPM-MPd di Kecamatan Soko dibentuk pada tahun 2008 dan kondisi PNPM-MPd di Kecamatan Soko saat ini dengan program – program yang dijalankan makin bertambah dengan dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat seko. Kondisi keuangan petani di Kecamatan Soko sangatlah minim meskipun besar peluang untuk menjalankan usaha pertanian tetapi yang menjadi hambatan adalah modal usaha, dengan adanya program PMPN-MPd masyarakat

miskin khususnya petani dapat mendapatkan bantuan pendanaan untuk modal usaha dari program PNPM-MPd.

Petani sangat miskin yang produktif menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dari pos alokasi dana sosial. Bentuk kegiatan dalam penyaluran dana sosial sangatlah beragam, ini tergantung kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan termasuk kebutuhan mendesak dari para petani miskin dan yang sangat miskin yang produktif yang harus dipenuhi untuk menentukan jenis kegiatan ini, harus diputuskan bersama antara jajaran kelembagaan PNPM dikecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Sedangkan operasional pelaksanaannya dilakukan oleh kepanitiaan yang dibentuk di forum MAD tersebut. “Ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas program. Kegiatan bantuan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu berbuat untuk saudaranya yang produktif di luar segmen garapan PNPM MPd yang selama ini kental dengan memberdayakan masyarakat miskin tidak produktif (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).

PNPM-MPd tidak memakai jaminan untuk perorangan tetapi jaminan berkelompok maka dari itu petani miskin mudah untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari PNPM-MPd. Dana yang diberikan kepada PNPM-MPd pada tahun 2013 adalah tiga Miliar dua ratus juta rupiah yang akan digunakan untuk modal usaha masyarakat miskin khususnya petani dan membangun sarana dan prasarana di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan pemberian dana bantuan untuk modal usaha dari PNPM-MPd di Kecamatan Seko berjalan dengan baik tetapi meskipun begitu, pihak dari PNPM-MPd masih merasa sedikit kesulitan untuk mencapai kinerja dari lembaga yang ada di Kecamatan Seko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Provinsi Sulawesi Selatan. Mengambil sebanyak 26 responden dengan menggunakan tehnik *simple cluster sampling* (Mantra dan Kasto, 2011) maka didapat 3 desa yaitu desa Padang Raya adalah desa terdekat dari Kecamatan Seko, desa Padang Balua adalah desa pertengahan dari Kecamatan Seko dan desa Tirobali adalah desa terjauh dari Kecamatan Seko. Selain itu untuk menentukan responden juga digunakan tehnik *purposive*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2013.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan petani responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (*Questionnaire*), sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan instansi/dinas terkait dengan penelitian ini.

Yantu dkk (2002) merumuskan Kinerja kelembagaan PNPM - MPd dalam manajemen bantuan modal usaha petani miskin digunakan konsep rasio yang dikonversi kepersentasi sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$KK = \frac{NC}{CH} \times 100\%$$

Keterangan :

KK = Kinerja Kelembagaan

NC = Nilai Capai

CH = Capaian Harapan

Kriteria kinerja kelembagaan adalah sebagai berikut : (i) skor lebih kecil 60 menunjukkan kinerja lembaga rendah; (ii) skor 60 – 80 menunjukkan kinerja lembaga sedang; (iii) skor kinerja berada diatas 80 menunjukkan kinerja lembaga tinggi. Skor yang sama juga telah digunakan oleh Yantu (2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kinerja Kelembagaan PNPM-MPd terhadap Petani Miskin Petani. Berdasarkan Hasil Penelitian kinerja kelembagaan PNPM-MPd dapat dilihat dan dirasakan oleh petani miskin (penerima bantuan) dengan indikator : Petani dapat

berhubungan baik dalam satu lingkungan, Bantuan dana untuk modal usaha yang PNPM-MPd berikan tepat sasaran, Petani miskin merasa puas dengan pelayanan yang diberikan PNPM-MPd.

Kinerja Kelembagaan. Nilai KK ialah nilai kinerja kelembagaan yang didapatkan setelah melakukan wawancara terhadap petani miskin yang meminjam dana bantuan modal usaha dari PNPM – MPd dan tim fasilitator keuangan PNPM-MPd di Kecamatan Seko dengan responden 26 orang yang didapatkan dari 3 Desa yaitu desa dekat, Desa Tengah, dan Desa terjauh dari Kecamatan Seko dengan menggunakan teknik *simple cluster sampling* dengan nilai capai yang didapatkan adalah 23 responden dengan menggunakan teknik *purposive* lalu dikonversi kepersentase sehingga didapatkan nilai KK = 88,46 % adalah nilai persepsi yang mengatakan kinerja lembaga baik sedangkan nilai KK = 11,53% adalah nilai persepsi yang mengatakan kinerja lembaga tidak baik, karena nilai persepsi KK yang mengatakan baik skornya lebih tinggi maka menunjukkan kriteria kinerja kelembagaan PNPM-MPd di Kecamatan Seko menunjukkan kriteria lembaga tinggi. Kategori tinggi, rendah, sedang berdasarkan hasil tabulasi persepsi

tentang program kelembagaan PNPM-MPd di Kecamatan Seko oleh responden baik atau tidak baik. Jadi, bila persepsi itu menempati kategori tinggi maka dikatakan tinggi, begitupun kategori sedang dan rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa persentase kinerja kelembagaan PNPM-MPd dalam manajemen bantuan modal usaha petani miskin adalah 88,46%, dan hasil kriteria kinerja kelembagaan PNPM-MPd menunjukkan kinerja lembaga Tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kelembagaan PNPM-MPd di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan layak untuk dipertahankan dengan melihat hasil dari kinerja kelembagaan PNPM-MPd, oleh sebab itu agar kinerja kelembagaan PNPM-MPd terus meningkat maka diharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan PNPM-MPd yang ada di Kecamatan Seko.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian dalam Negri Republik Indonesia, Jakarta
- Mantra, I.B. dan Kasto, 2011. Penentuan Sampel. *Dalam* Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor). 2011. *Metode Penelitian*. Survai. LP3E
- Puspa, (2010). Tulisan Hukum PNPM mandiri2. From <http://puspamandiri.blogspot.com/2010/11/latar-belakang-pengertian-dan-tujuan.html>mentrian
- Yantu, M.R, Mamiek Slamet, Thamrin, Franky Paut, 2002. *Studi Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi Sawah di Sulawesi Tengah*. Jurnal Agrisains 3(1) : 16-21. April 2002
- Yantu, M.R. dan Abdul Muis. 2002. *Peranan Kelembagaan Pertanian dalam Pembangunan Perdesaan*. Makalah Pemandu dalam Pelatihan PPL dan Petugas Central Sulawesi Integrated Area Development & Consevation Project (CSIADCP), Jum'at 21 Juni 2002, Bertempat di BLPP Sidera Biromaru, Palu.